

ABSTRAK

Pada tahun 1998 di Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Riau terjadi kebakaran besar yang menyebabkan sekitar 39 kapling rumah dan toko masyarakat terbakar. Kemudian, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan rekonstruksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Nomor Kpts.154/X/HK-1998.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan pemerintah daerah dalam rekonstruksi kapling tanah pasar Sungai Guntung pasca kebakaran berbasis keadilan sosial dan rekonstruksi kapling tanah bekas kebakaran pasar Sungai Guntung yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dimana luas kapling tanahnya tidak sesuai dengan luas yang ada disurat Inventarisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rekonstruksi kapling tanah pasar Sungai Guntung pasca kebakaran belum memenuhi unsur keadilan sosial karena dalam rekonstruksi kapling tanah tersebut terdapat hal-hal yang melanggar hak-hak masyarakat dimana masyarakat tidak mendapatkan keadilan yaitu kompensasi atas pengurangan ukuran kapling tanah milik masyarakat Sungai Guntung dimana terdapat kelebihan STUP berdasarkan norma hukum secara umum bahwa ada kehilangan tanah sebesar 42 sumbangan tanah untuk pembangunannya sebesar 29 % pemerintah seharusnya memberikan dana santunan 14 % dari harga tanah. Rekonstruksi kapling tanah bekas kebakaran pasar Sungai Guntung yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Riau ini luas kapling tanahnya tidak sesuai dengan ukuran surat tanah asalnya karena Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ingin menata kawasan kebakaran sehingga menjadi indah agar tanah-tanah masyarakat yang terdampak kebakaran menjadi lebih teratur sehingga kedepannya ketika dijual tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka dari itu tanah hasil penataan tersebut tidak sesuai dengan ukuran tanah semula. Sehingga Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut belum memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat Sungai Guntung karena masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah yang hilang akibat penataan ulang.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah Daerah, Rekonstruksi Kapling Tanah, Keadilan Masyarakat.*

ABSTRACT

In 1998, in Sungai Guntung, Indragiri Hilir Regency, Riau, there was a big fire that burned around 39 house lots and shops. Then, the government took a policy to carry out reconstruction based on the Regent's Decree of Level II Head District of Indragiri Hilir Number Kpts.154/X/HK-1998.

The purpose of this study is to find and analyze local government policy in the reconstruction of the Sungai Guntung market lots post the fire, based on social justice and the post-fire Sungai Guntung market lots reconstruction as determined by the Regent's Decree of Level II Head District of Indragiri Hilir where the lots areas is not relevant to the areas in the original land certificate. The research method used is empirical juridical, with descriptive analytical research specifications.

The results showed that the local government policy in the reconstruction of the Sungai Guntung market land plot after the fire did not fulfill the element of social justice because in the reconstruction of the land plot there were things that violated the rights of the community where the community did not get justice, namely compensation for reducing the size of the land plot. belonging to the Sungai Guntung community where there is an excess of STUP based on general legal norms that there is a loss of 42 land donations for the construction of 29% the government should provide a compensation fund of 14% of the land price. The irrelevancy between the areas in original land certificate and the areas in the reconstruction of market lots post-fire determined by the Regent's Decree of Level II District Head of Indragiri Hilir, Riau is caused by the Regional Government of Indragiri Hilir Regency intention that wants to organize the area that was once caught in fire so that it becomes more beautiful so that the people's lands affected by the fire became more organized hoping that in the future when the land is sold it has a high economic value. So, in conclusion, the Regional Government Policy has not fulfilled the element of justice for the Sungai Guntung community because the community did not get compensation for the land lost due to the reconstruction.

Keywords: Local Government Policy, Reconstruction of Land Lots, Community Justice.